

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kab. HSS

Oleh :

H. Muhammad Afif Bizri, SH, M. Hum, Hairul Ikhwan, S. Hut.
Hj. Rusmaliah, S. Hut. Yunita Anggeriana, S. Hut.

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) yang dijadwalkan hingga tahun 2030, merupakan rencana pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Prinsip utama dari SDGs adalah universalitas, integritas, serta inklusivitas dengan tujuan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal atau ditinggalkan, sering dikenal dengan sebutan *no one left behind*.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, secara umum terdapat 4 pilar dalam SDGs yang terdiri atas pilar ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola. SDGs berisikan komitmen global sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang terdiri atas 17 tujuan dan 169 target. Inilah yang menjadi panduan selama 15 tahun ke depan dalam menciptakan pembangunan yang inklusif (Bappenas, 2023).

Tanpa kelaparan atau dikenal dengan istilah *Zero Hunger* merupakan salah satu prioritas global yang tertuang dalam tujuan ke 2 dari 17 tujuan SDGs. Sasaran yang diupayakan tercapai di tahun 2030 adalah menghentikan kelaparan dan kekurangan gizi, menjamin keberlanjutan pertanian pangan, mengelola keragaman genetik, serta melipatgandakan produktivitas pertanian dengan memastikan akses bagi seluruh masyarakat.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kecukupan gizi penduduk adalah prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau yang dikenal dengan istilah *Prevalence Of Undernourishment (PoU)*. Seseorang masuk pada kategori tidak cukup pangan jika makanan yang dikonsumsi sehari – hari tidak cukup untuk dapat hidup normal, aktif, dan sehat.



Beberapa tahun terakhir dunia menghadapi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks, perubahan iklim, krisis ekonomi global, konflik, serta degradasi lingkungan hingga terganggunya rantai pasok pangan internasional merupakan beberapa hal penyebab terjadinya kerawanan pangan dan gizi.

Ringkasan

SDGs merupakan rencana pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Prinsip utama dari SDGs adalah universalitas, integritas, serta inklusivitas dengan tujuan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal.

Tanpa kelaparan atau dikenal dengan istilah *Zero Hunger* merupakan salah satu prioritas global yang tertuang dalam tujuan ke 2 dari 17 tujuan SDGs. Sasaran yang diupayakan tercapai di tahun 2030 adalah menghentikan kelaparan dan kekurangan gizi, menjamin keberlanjutan pertanian pangan, mengelola keragaman genetik, serta melipatgandakan produktivitas pertanian dengan memastikan akses bagi seluruh masyarakat.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kecukupan gizi penduduk adalah prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau yang dikenal dengan istilah *Prevalence Of Undernourishment (PoU)*.

PoU di Kab. HSS mencapai 6,26% pada 2023. Angka tersebut naik 0,62% dari tahun sebelumnya sebesar 5,64%, sedangkan dalam 5 tahun terakhir naik 2,11%. Rata-rata PoU Indonesia sebesar 8,53% pada 2023. Berarti, PoU di HSS lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Kalau dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, PoU di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada di urutan ke-12.

Adapun dalam penanganan masalah ini ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Memastikan ketersediaan dan kualitas pangan yang memadai bagi masyarakat.
2. Melakukan Optimalisasi Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pangan Bergizi untuk para siswa / pelajar, masyarakat miskin / penerima bantuan sosial.
3. Mengontrol harga bahan pangan di pasaran agar tidak terjadi inflasi.
4. Produksi pangan secara mandiri, seperti pengoptimalan lahan-lahan produktif secara individual di pekarangan
5. Melakukan Kajian/Analisa lanjutan tentang hubungan kemiskinan dan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kab. HSS
6. Strategi jangka panjang peningkatan pendapatan masyarakat dan pengendalian inflasi secara terpadu.
7. Pengembangan inovasi pertanian modern

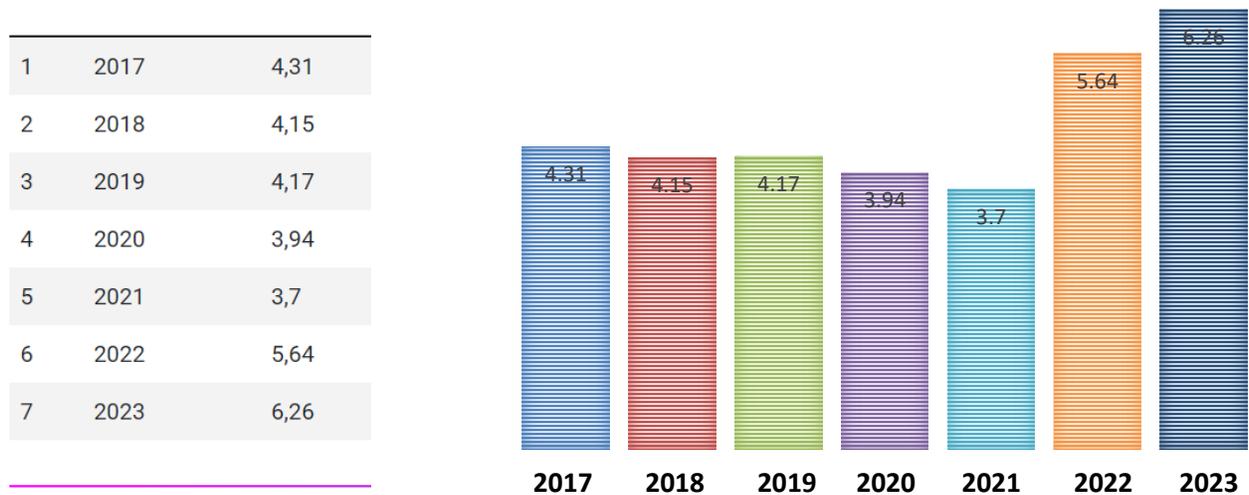
TINJAUAN KEBIJAKAN

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (NFA) dan juga Pemerintah Daerah terus melakukan upaya penanganan rawan pangan dan gizi serta mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan atau dikenal dengan istilah *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi.

Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan.

Pada dasarnya kerawanan pangan dan kemiskinan adalah dua hal yang berkaitan erat sehingga upaya dalam pengentasan kemiskinan akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan. Secara Nasional Tahun 2017 sampai tahun 2019, PoU mengalami penurunan dari 8,23% menjadi 7,63%. Namun sejak tahun 2020 -2022 PoU terus mengalami kenaikan sebesar 0,71% menjadi 8,34%, tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 10,21% pada tahun 2022. Untuk tahun 2023, Angka PoU mengalami penurunan menjadi 8,53%. Namun angka ini masih dibawah target dari amanat Perpres 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebesar 5% pada tahun 2024.

Penghitungan PoU ini merupakan kolaborasi antara Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (NFA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data dari survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS. Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi ketidacukupan pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan mencapai 6,26% pada 2023. Angka tersebut naik 0,62% dari tahun sebelumnya sebesar 5,64%, sedangkan dalam 5 tahun terakhir naik 2,11%. Rata-rata PoU Indonesia sebesar 8,53% pada 2023. Berarti, PoU di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, sebagaimana tergambar dalam data di bawah ini.



Menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), PoU merupakan suatu kondisi seseorang, secara reguler, mengkonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Indikator tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi.

Ini artinya, penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengkonsumsi makanan, tetapi kebutuhan energinya kurang, tidak sampai 6,26% dari total penduduk.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, PoU di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada di urutan ke-12. Wilayah dengan PoU terendah (urutan teratas) yakni Kabupaten Tanah Bumbu (2,31%) dan tertinggi (urutan terakhir) yakni Kabupaten Barito Kuala (6,73%). Berikut ini daftar PoU terendah di 13 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan pada 2023.

1. Kabupaten Tanah Bumbu: 2,31%
2. Kota Banjar Baru: 2,31%
3. Kota Banjarmasin: 3,56%
4. Kabupaten Tanah Laut: 4,06%
5. Kabupaten Tapin: 4,1%
6. Kabupaten Tabalong: 4,15%
7. Kabupaten Kota Baru: 4,43%
8. Kabupaten Hulu Sungai Tengah: 5,55%
9. Kabupaten Banjar: 5,61%
10. Kabupaten Hulu Sungai Utara: 5,63%
11. Kabupaten Balangan : 6,04%
12. Kabupaten Hulu Sungai Selatan : 6,26%
13. Kabupaten Barito Kuala : 6,73%

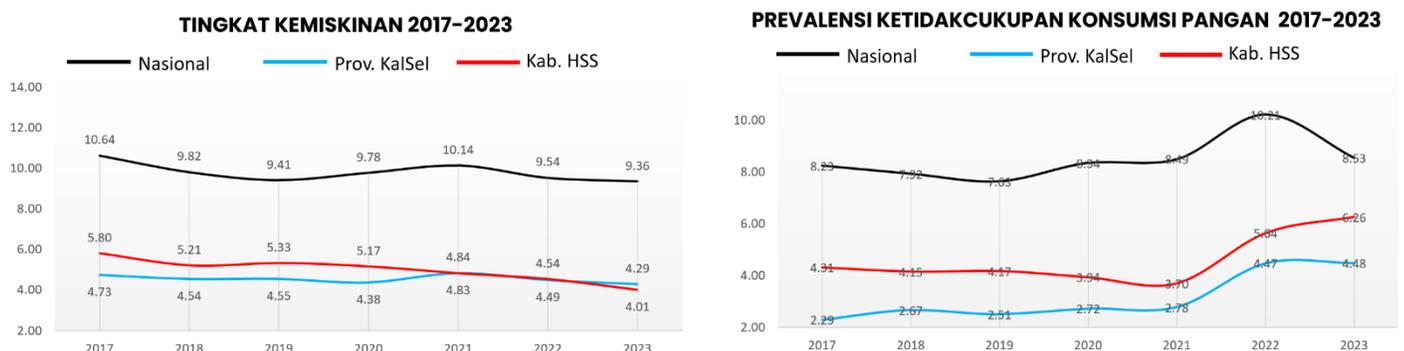
Tanah Laut	4,06
Kota Baru	4,43
Banjar	5,61
Barito Kuala	6,73
Tapin	4,10
Hulu Sungai Selatan	6,26
Hulu Sungai Tengah	5,55
Hulu Sungai Utara	5,63
Tabalong	4,15
Tanah Bumbu	2,31
Balangan	6,04
Kota Banjarmasin	3,56
Kota Banjar Baru	2,31

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Jumlah Penduduk Miskin (JPM) memiliki pengaruh terhadap Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan. Jumlah penduduk miskin (JPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan. Data menunjukkan ketika jumlah penduduk miskin meningkat sebesar satu satuan akan menyebabkan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan meningkat sebesar 1,59 persen. Sebaliknya jika jumlah penduduk miskin menurun sebesar satu satuan maka prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan menurun sebesar 1,59 persen.

Artinya bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di suatu wilayah maka akan mempengaruhi prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan. Semakin banyak jumlah penduduk miskin akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat khususnya terhadap makanan, sehingga dapat menyebabkan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan mengalami peningkatan.

Fenomena meningkatnya jumlah penduduk miskin berkaitan erat dengan akses seseorang terhadap makanan. Maka dapat diartikan bahwa kemiskinan mengakibatkan penurunan akses penduduk terhadap makanan dalam memenuhi kecukupan energi serta nutrisi untuk dapat hidup aktif dan sehat. Dampak yang begitu besar dari kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama dari kerawanan pangan.

Namun di beberapa tahun terakhir format ini tidak berlaku dan mungkin perlu penelitian lebih mendalam terkait hal ini terutama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan meningkat tinggi di tengah penurunan kemiskinan. Hal ini juga terjadi di beberapa tahun baik secara Nasional dan juga Provinsi Kalimantan Selatan, namun dengan angka yang tidak terlalu drastis. Hal ini dapat dilihat dalam data di bawah ini.



Adapun bagi Pemerintah Daerah perlu melakukan strategi ketahanan pangan yang berkelanjutan yang tentunya akan berkorelasi dengan banyak aspek lainnya seperti kemiskinan, stunting, inflasi, kesehatan dan lainnya. Adapun dalam penanganan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ada beberapa kebijakan yang dapat diefektifkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

1. Memastikan ketersediaan dan kualitas pangan yang memadai bagi masyarakat, lebih khusus dalam produksi domestik dan distribusi yang merata di seluruh daerah. Peningkatan produksi pangan domestik diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap distribusi dan rantai pasok produk pangan serta pengendalian biaya produksi. Pengendalian biaya produksi komoditas pangan dapat difokuskan kepada pengendalian biaya perawatan (pupuk, obat-obatan, dll.)
2. Melakukan Optimalisasi Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pangan Bergizi, Makanan berkualitas dan gizi adalah landasan kesehatan dan manfaatnya dapat dirasakan seumur hidup. Kegiatan ini dapat disemarakkan untuk para siswa / pelajar, masyarakat miskin / penerima bantuan. Dengan harapan mengajarkan anak tentang kebiasaan makan yang sehat sejak dini, mereka akan memiliki hubungan yang positif dengan makanan hingga tumbuh dewasa.
3. Mengontrol harga bahan pangan di pasaran agar tidak terjadi inflasi makanan atau sejenisnya yang nanti berdampak pada tingkat konsumsi pangan masyarakat. Peningkatan pengeluaran perkapita, produksi beras perkapita, dan realisasi bantuan sosial perkapita akan memberi pengaruh terhadap penurunan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan, sebaliknya, peningkatan rata-rata inflasi makanan bulanan memberi pengaruh terhadap peningkatan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan.
4. Produksi pangan secara mandiri, seperti pengoptimalan lahan-lahan produktif secara individual di pekarangan sebagai kemandirian pangan, contohnya menanam sayuran, cabai, jagung dan pangan lainnya.
5. Melakukan Kajian/Analisa lanjutan tentang hubungan kemiskinan dan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kajian/Analisa ini dapat dikhususkan dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.
6. Strategi jangka panjang peningkatan pendapatan masyarakat dan pengendalian inflasi secara terpadu. Perbedaan pada tingkat pendapatan akan menyebabkan variasi dalam pola distribusi pendapatan, termasuk cara rumah tangga mengalokasikan pengeluarannya. Ketika pendapatan terbatas, individu atau rumah tangga cenderung memprioritaskan kebutuhan makanan, menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi makanan.

Secara umum jika semakin rendah persentase pengeluaran untuk pangan, maka akan semakin meningkat kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan, maka masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang termasuk kebutuhan pokok yaitu makanan dan minuman. Artinya peningkatan pendapatan akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.

Namun fakta yang terjadi, Meskipun pendapatan yang tercermin dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita menunjukkan peningkatan, namun tingkat konsumsi mengalami penurunan. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan terkikis oleh kenaikan harga barang yang dibutuhkan yang tercermin dalam tingkat inflasi.

Maka dari itu potensi kecukupan gizi akan diabaikan, khususnya pada masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan.

7. Pengembangan inovasi-inovasi pertanian modern seperti *smart greenhouse* yang disertai pemberian fasilitas akses teknologi kepada masyarakat akan mendorong terjadinya transformasi pertanian dan perikanan guna mendongkrak produktivitas dan menghadapi perubahan iklim. Di samping upaya-upaya intensifikasi pertanian, pemerintah perlu mendorong program diversifikasi pangan dengan mengedepankan komoditas-komoditas pangan lokal yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan dapat menjadi substitusi komoditas pangan yang masih dominan impor.